



MANAJEMEN PUBLIK



Selfi Budi Helpiastuti, Ahmad Farouq Mulku Zahari, Putri Cinta Mei, Imanuddin Hasbi,
Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Abul Haris Suryo Negoro, Setyowati Karyaningtyas,
Wydha Mustika Maharani, Muhamad Nanda Al Hakim Akbar, Yaen Miftakhul Laily,
Sri Juni Woro Astuti, Fajri Maulana, Masadib Akmal Vyandri, R. Sally Marisa Sihombing

MANAJEMEN PUBLIK

Selfi Budi Helpiastuti, Ahmad Farouq Mulku Zahari, Putri Cinta Mei, Imanuddin Hasbi,
Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Abul Haris Suryo Negoro, Setyowati Karyaningtyas,
Wydha Mustika Maharani, Muhamad Nanda Al Hakim Akbar, Yaen Miftakhul Laily,
Sri Juni Woro Astuti, Fajri Maulana, Masadib Akmal Vyandri, R. Sally Marisa Sihombing



MANAJEMEN PUBLIK

Tim Penulis:

Selfi Budi Helpiastuti, Ahmad Farouq Mulku Zahari, Putri Cinta Mei, Imanuddin Hasbi,
Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Abul Haris Suryo Negoro, Setyowati Karyaningtyas,
Wydha Mustika Maharani, Muhamad Nanda Al Hakim Akbar, Yaen Miftakhul Laily,
Sri Juni Woro Astuti, Fajri Maulana, Masadib Akmal Vyandri, R. Sally Marisa Sihombing

Desain Cover:

Usman Taufik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-246-262-1

Cetakan Pertama:

September, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Manajemen Publik” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Manajemen Publik.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR MANAJEMEN PUBLIK	1
A. Definisi Manajemen Publik.....	2
B. Sejarah dan Perkembangan Manajemen Publik	6
C. Perbedaan Manajemen Publik dan Manajemen Swasta.....	10
D. Tujuan Manajemen Publik.....	12
E. Ruang Lingkup Manajemen Publik	14
F. Peran Manajemen Publik Dalam Pelayanan Masyarakat.....	15
G. Rangkuman Materi	18
BAB 2 TEORI DAN PARADIGMA MANAJEMEN PUBLIK	23
A. Pendahuluan	24
B. Teori Klasik Dalam Manajemen Publik	24
C. Teori Neo-Klasik Dalam Manajemen Publik	28
D. Pendekatan Manajemen Publik Baru (New Public Management).....	31
E. Good Governance Sebagai Paradigma Baru.....	35
F. Prinsip-Prinsip Manajemen Publik Modern.....	37
G. Perubahan Paradigma Dari Birokrasi Ke Pelayanan Publik	39
H. Rangkuman Materi	41
BAB 3 TEORI KLASIK DALAM MANAJEMEN PUBLIK.....	45
A. Pendahuluan.....	46
B. Teori Klasik dalam Manajemen Publik.....	48
C. Teori Neo-Klasik dalam Manajemen Publik.....	53
D. Pendekatan Manajemen Publik Baru (<i>New Public Management/NPM</i>)	60
E. Good Governance sebagai Paradigma Baru	72
F. Prinsip-prinsip Manajemen Publik Modern.....	82
G. Perubahan Paradigma dari Birokrasi ke Pelayanan Publik	94
H. Penutup	104
I. Rangkuman Materi	106

BAB 4 PERENCANAAN STRATEGIS DALAM MANAJEMEN PUBLIK	113
A. Pendahuluan.....	114
B. Konsep Perencanaan Strategis	115
C. Langkah-langkah Perencanaan Strategis.....	124
D. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal	125
E. Formulasi Strategi.....	128
F. Implementasi Strategi	129
G. Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Strategis.....	131
H. Rangkuman Materi	133
BAB 5 ORGANISASI PUBLIK.....	137
A. Pendahuluan.....	138
B. Konsep Organisasi Publik.....	138
C. Relevansi Organisasi Publik Dengan Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	140
D. Karakteristik Organisasi Publik	141
E. Manajemen dan Tata Kelola Dalam Organisasi Publik	143
F. Fungsi dan Peran Organisasi Publik.....	148
G. Rangkuman Materi	153
BAB 6 KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN PUBLIK	157
A. Konsep Kepemimpinan Dalam Organisasi Publik	158
B. Gaya Kepemimpinan Dalam Manajemen Publik	160
C. Keterampilan Yang Dibutuhkan Pimpinan Publik.....	162
D. Peran Pemimpin Dalam Perubahan Organisasi	165
E. Kepemimpinan Partisipatif	168
F. Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional	171
G. Rangkuman Materi	174
BAB 7 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MANAJEMEN PUBLIK	181
A. Konsep Pengambilan Keputusan	182
B. Jenis-Jenis Keputusan Dalam Manajemen Publik.....	185
C. Model Pengambilan Keputusan	189
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan	197
E. Teknik dan Alat Bantu Pengambilan Keputusan.....	200
F. Proses Evaluasi Keputusan	204
G. Rangkuman Materi	208

BAB 8 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PUBLIK	213
A. Definisi dan Konsep Manajemen SDM Publik	214
B. Proses Rekrutmen dan Seleksi.....	215
C. Pelatihan dan Pengembangan	218
D. Evaluasi Kinerja Pegawai	221
E. Sistem Penggajian dan Insentif.....	224
F. Motivasi dan Kesejahteraan Pegawai.....	224
G. Rangkuman Materi	225
BAB 9 PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT	229
A. Pendahuluan.....	230
B. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Publik	233
C. Penyusunan Anggaran Publik	235
D. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja	237
E. Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan	239
F. Audit Keuangan Publik.....	240
G. Pengawasan dan Pengendalian Keuangan	243
H. Rangkuman Materi	247
BAB 10 STRATEGI DALAM MANAJEMEN PUBLIK	251
A. Pendahuluan	252
B. Definisi Kebijakan Publik.....	253
C. Siklus Kebijakan Publik	256
D. Peran Stakeholder Dalam Kebijakan Publik.....	258
E. Formulasi Kebijakan Publik.....	260
F. Implementasi Kebijakan Publik	260
G. Evaluasi Kebijakan Publik.....	262
H. Rangkuman Materi	263
BAB 11 AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN PUBLIK	271
A. Pendahuluan	272
B. Konsep Akuntabilitas	273
C. Jenis-Jenis Akuntabilitas	276
D. Instrumen Akuntabilitas	286
E. Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal.....	290
F. Peran Akuntabilitas Dalam Good Governance	291
G. Hubungan Akuntabilitas Dengan Kinerja.....	297
H. Rangkuman Materi	299

BAB 11 TRANSPARANSI DALAM MANAJEMEN PUBLIK	305
A. Konsep Transparansi	306
B. Prinsip-prinsip Transparansi	308
C. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi	310
D. Hambatan Transparansi di Sektor Publik	312
E. Manfaat Transparansi Bagi Masyarakat	315
F. Indikator Transparansi yang Efektif	317
G. Rangkuman Materi	318
BAB 13 KOLABORASI DAN KEMITRAAN DALAM MANAJEMEN PUBLIK ...	321
A. Pendahuluan	322
B. Konsep Kolaborasi Publik	323
C. Bentuk-bentuk Kemitraan	325
D. Proses Kolaborasi Yang Efektif	328
E. Faktor-faktor Keberhasilan Kolaborasi	331
F. Peran Sektor Swasta dan Masyarakat Dalam Kolaborasi	334
G. Kolaborasi Lintas Sektor	336
H. Rangkuman Materi	338
BAB 14 MANAJEMEN RESIKO SEKTOR PUBLIK	345
A. Manajemen Resiko	346
B. Identifikasi Resiko Sektor Publik	351
C. Mitigasi Resiko	372
D. Monitoring dan Pengendalian Resiko	384
E. Pengendalian Resiko Sektor Publik Suatu Definisi	392
F. Rangkuman Materi	408
GLOSARIUM	417
PROFIL PENULIS	427



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 1: PENGANTAR MANAJEMEN PUBLIK

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si

Administrasi Negara, FISIP Universitas Jember

BAB 1

PENGANTAR MANAJEMEN PUBLIK

Manajemen publik merupakan disiplin ilmu yang memiliki peran penting dalam tata kelola organisasi pemerintahan dan institusi publik. Fokus utama dari manajemen publik adalah memastikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun, definisi manajemen publik tidaklah tunggal karena mencerminkan berbagai konteks sosial, politik, dan budaya. Untuk memahami disiplin ini secara komprehensif, diperlukan pengintegrasian berbagai pandangan yang relevan. Bab ini berusaha memberikan gambaran menyeluruh tentang manajemen publik dengan menyelaraskan perspektif yang ada, secara komprehensif.

A. DEFINISI MANAJEMEN PUBLIK

1. Definisi Manajemen Publik: Perspektif yang Terpadu

Manajemen publik dapat dipahami sebagai seni dan ilmu yang berfokus pada pengelolaan sumber daya publik demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan ini melibatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta inovasi untuk menjawab tantangan modern. Dalam pandangan yang lebih luas, manajemen publik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi birokrasi, tetapi juga dengan penciptaan tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Denhardt & Denhardt (2015), manajemen publik adalah tentang melayani warga negara, bukan sekadar mengendalikan mereka. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi, tujuan bersama, dan pemberdayaan komunitas dalam tata kelola publik. Pandangan ini menunjukkan perubahan paradigma dari model birokrasi tradisional yang hierarkis menuju pendekatan yang lebih partisipatif. Manajemen publik harus berfokus pada kepentingan publik dengan mengutamakan

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bouckaert, G., & Pollitt, C. (2021). *Reforming Public Management: New Trends and Challenges*. Routledge.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2022). *The Digital Era Governance*. Oxford University Press.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasojo, Eko. (2018). *Birokrasi dan Demokrasi: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Fattah, N. (2004). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.
- Ghofur, N. (2014). *Manajemen Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Helpiastuti, S. B., Hendrayady, A., Widnyani, I. A. P. S., Setyawati, I., Sarinah, L., Awaludin, D. T., Ardiansyah, T., Nurdin, N. H., & Orbawati, E. B. (2024). *Manajemen Pelayanan Umum*. CV Widina Media Utama.
- https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/569713-manajemen-pelayanan-umum-7ed59e95.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Helpiastuti. (2024). *Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Bandung: Widina Media Utama. Retrieved from <https://repository.penerbitwidina.com/publications/569639/administrasi-negara-prinsip-dan-praktik>
- Hood, C. (1991). *A Public Management for All Seasons?* Public Administration, 69(1), 3-19.
- Keban, Y.T. (2004). *Manajemen Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- Keban, Y.T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Majid, J. (2023). *Manajemen Sektor Publik: Konsep dan Teori*. Makassar: Alauddin University Press.
- Manullang, M. (2006). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Pangkey, Dr. Itje. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Tahta Media Group.
https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/download/517/513/1926?utm_source=chatgpt.com
- Rainey, H. G. (2009). *Understanding and Managing Public Organizations*. John Wiley & Sons.
- Taufiqurokhman, Dr., & Satispi, Dr. Evi. (2017). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
https://lib.algazali.ac.id/assets/uploads/ebook/BUKU-PELAYANAN-PUBLIK_lengkap-rev.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press.



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 2: TEORI DAN PARADIGMA MANAJEMEN PUBLIK

Ahmad Farouq Mulku Zahari, S.Sos.,M.A.P.

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

BAB 2

TEORI DAN PARADIGMA MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Manajemen publik membahas bagaimana organisasi sektor publik dikelola untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Pada bab 2 ini, akan dibahas mengenai teori dan paradigma manajemen publik yang mencakup teori klasik dalam manajemen publik, teori neoklasik dalam manajemen publik, pendekatan manajemen publik baru (*new public management*), *good governance* sebagai paradigma baru, prinsip-prinsip manajemen publik modern, dan perubahan paradigma dari birokrasi ke pelayanan publik.

B. TEORI KLASIK DALAM MANAJEMEN PUBLIK

Teori klasik dalam manajemen publik merupakan salah satu pendekatan awal dalam ilmu administrasi yang berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Teori ini menekankan efisiensi, pembagian kerja, hierarki, serta struktur organisasi yang sistematis. Fokus utama teori klasik adalah bagaimana organisasi dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dan birokrasi, (Febriandiela & Adnan, 2023). Teori klasik dalam manajemen publik juga memberikan landasan bagi pengelolaan administrasi yang lebih terstruktur dan efisien. Dengan tokoh-tokoh seperti Taylor, Fayol, dan Weber, teori ini membantu menciptakan standar birokrasi dan sistem administrasi yang masih digunakan hingga saat ini. Namun, dengan perkembangan zaman, teori ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih fleksibel agar dapat memenuhi tuntutan administrasi publik modern yang lebih dinamis dan berorientasi pada pelayanan publik, (Febriandiela & Adnan, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Bowman, J. S., & West, J. P. (2021). *Public Service Ethics*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003203148>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315709765>
- Fadli, Z., Mulyati, Austin, T., Lasmiatun, K., Rukmana, A. Y., Amane, A. P. O., Choerudin, A., Normansyah, Herdiansyah, D., Yanto, R., & Sukarman. (2023). *Dasar-dasar manajemen Publik*. Get Press indonesia.
- Febriandiela, F., & Adnan, M. F. (2023). Relevansi Teori Klasik dalam Konteks Administrasi publik Modern. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 8(2).
- Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Good Governance*. Penerbit Samudra Biru
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? 1. *Public Management Review*, 8(3), 377–387.
<https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Puspawati, A. A. (2016). Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik PUBLISIA*, 1(1), 38–53.
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/426>
- Rodin, R., Putra, W., Yanto, M., & Azwar, B. (2025). Pendekatan Klasik dalam Teori Organisasi dan Relevansinya dengan Manajemen Pendidikan Islam: Systematic Review. 351–366.
<https://doi.org/10.30868/im.v7i02.7636>
- Satibi, I. (2012). Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik. In *Unpas Press*.
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/480>

- Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Nugraha, N. A., Purba, P. B., Komariyah, I., Purba, S., Tjiptadi, D. D., Ashoer, M., Silalahi, M., Dewi, I. K., Yayasan, P., & Menulis, K. (2020). *Manajemen Sektor Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Yenni. (2013). Prinsip-Prinsip Good Governance. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 196–209. <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=652>



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 3: TEORI KLASIK DALAM MANAJEMEN PUBLIK

Putri Cinta Mei, S.Sos., M.A.P

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Islam Balitar

BAB 3

TEORI KLASIK

DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pengembangan pendekatan yang sistematis, rasional, dan kontekstual dalam pengelolaan sektor publik, sangat penting untuk memahami teori dan paradigma manajemen publik. Teori memberikan kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana organisasi publik beroperasi, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana sumber daya dikelola untuk mencapai tujuan publik. Selain itu, teori berfungsi sebagai alat analisis, yang memungkinkan akademisi dan praktisi untuk menemukan pola, memahami apa yang menyebabkan kegagalan, dan membangun intervensi yang lebih baik untuk tata kelola pemerintahan (Christensen, Laegreid, & Rykkja, 2022, p. 17). Paradigma manajemen publik adalah kerangka pemikiran dominan yang memengaruhi cara organisasi diatur, kebijakan dibuat, dan layanan publik diberikan. Jika tidak, manajemen publik mungkin menjadi praktik ad-hoc, tidak terarah, sulit dievaluasi, dan reaktif terhadap perubahan. Nilai, fokus, dan metode yang berubah dalam praktik manajemen publik ditunjukkan oleh pergeseran dari paradigma administrasi publik konvensional ke New Public Management (NPM), dan kemudian ke Good Governance dan New Public Service. Paradigma ini tidak hanya mengubah struktur dan pendekatan kelembagaan, tetapi juga mendefinisikan kembali peran pemerintah dan hubungan antara negara dan warganya. Dengan memahami teori dan paradigma secara menyeluruh, manajer publik dapat memahami dinamika di dalam organisasi dan merespons tantangan di luar. Hal ini penting mengingat masalah publik yang semakin kompleks, kekurangan sumber daya, dan tekanan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, inovasi kebijakan dan manajemen yang lebih inklusif dan berbasis nilai publik dapat dicapai melalui pemahaman tentang pergeseran paradigma dan keragaman teori (Bovaird & Löffler, 2021, p. 24). Oleh karena itu, memahami teori dan paradigma merupakan kebutuhan praktis untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Christensen, T., Laegreid, P., & Rykkja, L. H. (2022). *Organization theory and the public sector: Instrument, culture and myth* (2nd ed.). Routledge.
- Osborne, S. P. (2022). *Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society*. Routledge.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2021). *Public management and governance* (4th ed.). Routledge.
- Weber, M. (2021). *Bureaucracy and organizational structure*. (Edisi modern). Routledge.
- Fayol, H. (2020). *General and industrial management*. Martino Fine Books.
- Gulick, L. (2019). *Notes on the theory of organization*. The Institute of Public Administration.
- Osborne, D. (2020). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2021). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). Boston: Pearson Education.
- Siagian, S. P. (2012). *Teori dan Praktik Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, B. (2012). *Paradigma Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Fernandez, S., Rainey, H. G., & Malatesta, D. (2021). *Understanding and Managing Public Organizations* (6th ed.). Wiley.
- Pearce, J. L., & Sowa, J. E. (2024). *Organizational Behavior and Management: Real Research for Public and Nonprofit Managers* (2nd ed.). Melvin & Leigh Publishers.
- Van der Voet, J., & Vermeeren, B. (2022). *Human resource management and public service motivation: Current knowledge and future directions*. *Public Administration Review*, 82(1), 15–26.
- Wright, B. E., & Hassan, S. (2020). *Public service motivation and the motivation of public employees: The role of relational job design*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(2), 233–248.

- Fernandez, S., Rainey, H. G., & Malatesta, D. (2021). *Understanding and Managing Public Organizations* (6th ed.). Wiley.
- Isomura, K. (2021). *Management Theory by Chester Barnard: An Introduction*. Springer Singapore.
- Busro, M. (2023). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (cet. ke-3, hlm. 56–70). Prenada Media.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2021). *Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management*. Routledge.
- Rainey, H. G. (2018). *Understanding and Managing Public Organizations* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Hughes, O. E. (2019). *Public Management and Administration: An Introduction* (6th ed.). Red Globe Press.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis - Into the Age of Austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- Perry, J. L. (Ed.) & Volcker, P. A. (Contributor). (2024). *Public Service and Good Governance for the Twenty-First Century*. University of Pennsylvania Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- Torfin, J., Andersen, L. B., Greve, C., & Klausen, K. K. (2021). *Public Governance Paradigms: Competing and Co-Existing*. Edward Elgar Publishing.
- Madura, J. (2022). *Public Accountability and the Role of Ombudsman in Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Rasyid, H. M. (2023). *E-Government dan Transformasi Pelayanan Publik di Era Digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryono, S. (2020). *Penguatan Peran Masyarakat Sipil dalam Pemerintahan yang Demokratis*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Eggers, W. D., & Singh, S. K. (2021). *The Public Innovator's Playbook: Nurturing Bold Ideas in Government*. New York: Deloitte Press.
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2022). *Policy Capacity and Governance in the Digital Age*. London: Palgrave Macmillan.

- Gil-García, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2020). *Digital Government: Research and Practice*. Springer.
- Harijanti, S. D., & Rizky, A. A. (2021). *Tata Kelola Digital: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Misuraca, G., & Savoldelli, A. (2022). *Digital Government: Managing Public Services in the Era of Artificial Intelligence and Big Data*. London: Routledge.
- Sorrentino, M., & De Simone, E. (2021). *Governance and Performance in Public Sector Organizations*. Palgrave Macmillan.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative governance in theory and practice*. In E. Ongaro & S. van Thiel (Eds.), **The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe** (pp. 183–204). Palgrave Macmillan.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2020). *Public participation for 21st century democracy*. Wiley.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2020). *Interactive governance: Advancing the paradigm*. Oxford University Press.
- Torfing, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sørensen, E. (2021). *Interactive governance: Advancing the paradigm*. Oxford University Press.
- Head, B. W. (2023). *Reconsidering evidence-based policy: What can it offer public administration?* *Public Administration Review*, 83(2), 255–267.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2021). *Agile government: Systematic literature review and future research agenda*. *Government Information Quarterly*, 38(3), 101577.



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 4: PERENCANAAN STRATEGIS DALAM MANAJEMEN PUBLIK

Dr. Imanuddin Hasbi, S.T., M.M.

Universitas Telkom

BAB 4

PERENCANAAN STRATEGIS DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Manajemen publik berbeda dari manajemen swasta dalam beberapa hal utama. Organisasi publik biasanya memiliki tujuan yang lebih luas daripada organisasi swasta, dan mereka seringkali tunduk pada pengawasan politik yang lebih besar. Selain itu, organisasi publik seringkali diharapkan untuk memberikan layanan kepada semua anggota masyarakat, terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar.

Manajemen publik dan perencanaan strategis memiliki keterkaitan yang sangat erat antara lain:

1. Perencanaan Strategis sebagai Alat Manajemen Publik: Perencanaan strategis sebagai alat penting bagi organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks manajemen publik, perencanaan strategis membantu pemerintah dan lembaga publik untuk: a. Menentukan arah kebijakan publik; b. Mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien; c. Meningkatkan kinerja pelayanan publik; d. Meningkatkan akuntabilitas publik; e. Melaksanakan; dan f. Mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif & efisien.
2. Fokus pada Kepentingan Publik: Manajemen publik berfokus pada pelayanan kepentingan publik. Perencanaan strategis dalam sektor publik harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi publik/masyarakat. Proses perencanaan strategis harus melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Akuntabilitas dan Transparansi: Manajemen publik menekankan akuntabilitas dan transparansi. Perencanaan strategis membantu organisasi sektor publik untuk menetapkan tujuan yang terukur dan

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (5th ed.). Jossey-Bass.
- Ekowanti, M. R. L. (2023). Manajemen strategi sektor publik (MSSP). Rajawali Buana Pusaka.
- Gaspersz, V. (2004). Perencanaan strategik untuk peningkatan kinerja sektor publik. Gramedia Pustaka Utama.
- Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University Press.
- Moore, M. H. (2013). *Recognizing public value*. Harvard University press.**
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B. W., & Lampel, J. (2005). *Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management*. Free Press.
- Osborne, S. P. (2010). The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. Routledge.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Umar, Husein. (2002). Strategic Management In Action Konsep, teori dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep Michael R Porter Fred R David dan Wheelen Hunger. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yulianti, D. (2018). Manajemen strategi sektor publik. Pusaka Media.



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 5: ORGANISASI PUBLIK

Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP.

Universitas Ngurah Rai

BAB 5

ORGANISASI PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Bab IV organisasi publik, uraian yang sangat padat. Penulis berharap dapat memberikan pemahaman kepada pembaca berkaitan dengan konsep organisasi publik tentang definisi dari beberapa ahli, perbedaan organisasi publik dengan *private*, karakteristik organisasi publik, manajemen dan tata Kelola organisasi publik, fungsi dan peran organisasi publik, hubungan organisasi publik dengan pemangku kepentingan lainnya. Bab ini disertai pula dengan evaluasi berupa tugas essay yang bersifat kontekstual.

B. KONSEP ORGANISASI PUBLIK

Organisasi publik memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat. Keberadaannya berakar dari kebutuhan suatu negara atau komunitas untuk mengatur sumber daya, menegakkan hukum, serta menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan.

Konsep organisasi publik berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Pada awalnya, organisasi publik didominasi oleh sistem birokrasi tradisional sebagaimana yang dikemukakan oleh Max Weber, yang menekankan hierarki, aturan formal, serta pembagian kerja yang jelas. Namun, dalam perkembangannya, konsep ini mengalami transformasi dengan munculnya pendekatan **New Public Management (NPM)** yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil, serupa dengan praktik manajemen di sektor swasta. Selain itu, paradigma **Good Governance** dan **New Public Service (NPS)** semakin menegaskan bahwa organisasi publik tidak hanya berfokus pada administrasi yang efisien, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan meningkatnya tuntutan

DAFTAR PUSTAKA

- Fathur Rahman & Janwan Sri R.T (2020). *INOVASI PEMERINTAHAN: MENUJU TATA KELOLA DAERAH IDEAL*. Malang, Instrans Publishing.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2005. *MANAJEMEN: DASAR, PENGERTIAN, DAN MASALAH*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Indra Bastian, 2016. *STRATEGI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK*. Jakarta Selatan, Salemba Empat.
- Sondang P. Siagian, 1988. *FILSAFAT ADMINISTRASI*. Jakarta, Haji Mas Agung.
- Ulber Silalahi, 2015. *ASAS-ASAS MANAJEMEN*. Bandung, Refika Aditama.
- Widnyani, I, A, P, S. (2017). *PERGESERAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PELAYANAN PUBLIK*. Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 8(2), pp.93-102. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.8.2.1060.93-102> (diakses tanggal 13 Pebruari 2025).
- Sangkala (2016). *DIMENSI-DIMENSI MANAJEMEN PUBLIK*. Surabaya, Capiya Publishing.
- Sedana, I Wayan A., et al. (2025). *EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI ERA KECERDASAN BUATAN*. Edited by Widnyani, Ida Ayu P. S., and Ida Ayu G. Girindra, Bandung, CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Wursanto, 2005. *DASAR-DASAR ORGANISASI*. Yogyakarta, Andi.



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 6: KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN PUBLIK

Abul Haris Suryo Negoro S.IP., M.Si

FISIP Universitas Jember

BAB 6

KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI PUBLIK

Kepemimpinan dalam organisasi publik merupakan aspek fundamental yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pencapaian tujuan institusional. Berbeda dari organisasi privat yang berorientasi pada laba, organisasi publik memiliki misi pelayanan yang menuntut integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Pemimpin dalam sektor publik tidak hanya dituntut memiliki kapasitas manajerial, tetapi juga sensitif terhadap dinamika sosial, politik, dan birokrasi yang kompleks (Van Wart, 2013). Oleh karena itu, kepemimpinan publik melibatkan kemampuan untuk mengarahkan organisasi secara kolektif, memediasi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, serta menciptakan inovasi dalam kebijakan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Boin dan 't Hart (2003), kepemimpinan dalam organisasi publik juga berkaitan erat dengan kemampuan menangani krisis, membangun kepercayaan publik, serta mengartikulasikan visi bersama. Pemimpin publik yang efektif biasanya mampu mempengaruhi perubahan struktural dan budaya organisasi dengan mengandalkan legitimasi yang berasal dari kepercayaan masyarakat dan keberhasilan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, kepemimpinan di sektor publik juga sangat dipengaruhi oleh regulasi dan norma-norma institusional yang membatasi ruang gerak pemimpin dalam pengambilan keputusan, yang membuatnya berbeda secara signifikan dengan kepemimpinan di sektor swasta (Fernandez & Rainey, 2006).

Dalam tata kelola modern, konsep kepemimpinan publik telah mengalami pergeseran dari pendekatan hierarkis menuju model yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Pemimpin publik masa kini diharapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2009). Reflections: Our journey in organizational change research and practice. *Journal of Change Management*, 9(2), 127–142. <https://doi.org/10.1080/14697010902879079>
- Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2004). *Multifactor leadership questionnaire: Third edition manual and sampler set*. Mind Garden.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Psychology Press.
- Bingham, L. B., Nabatchi, T., & O'Leary, R. (2005). The new governance: Practices and processes for stakeholder involvement. *Public Administration Review*, 65(5), 547–558. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00482.x>
- Boin, A., & 't Hart, P. (2003). Public leadership in times of crisis: Mission impossible? *Public Administration Review*, 63(5), 544–553. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2003.00313.x>
- Breevaart, K., Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2014). The influence of leadership on follower well-being. *Applied Psychology: An International Review*, 63(3), 416–441. <https://doi.org/10.1111/apps.12025>
- Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. *The Leadership Quarterly*, 17(6), 595–616. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12139>

- Buchanan, D. A., & Huczynski, A. A. (2019). *Organizational behaviour* (10th ed.). Pearson Education.
- Burnes, B. (2017). *Managing change* (7th ed.). Pearson Education.
- Caldwell, R. (2003). Models of change agency: A fourfold classification. *British Journal of Management*, 14(2), 131–142. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00309>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. M.E. Sharpe.
- Eisenbeiss, S. A., van Knippenberg, D., & Boerner, S. (2008). Transformational leadership and team innovation: Integrating team climate principles. *Journal of Applied Psychology*, 93(3), 730–743. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.3.730>
- Fernandez, S., & Rainey, H. G. (2006). Managing successful organizational change in the public sector. *Public Administration Review*, 66(2), 168–176. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00527.x>
- Fernandez, S., & Rainey, H. G. (2021). Managing successful organizational change in the public sector. *Public Administration Review*, 81(3), 465–475. <https://doi.org/10.1111/puar.13316>
- Gandolfi, F., & Stone, S. (2018). Leadership, leadership styles, and servant leadership. *Journal of Management Research*, 18(4), 261–271. <https://doi.org/10.5296/jmr.v18i4.13903>
- Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2013). *Primal leadership: Unleashing the power of emotional intelligence*. Harvard Business Review Press.
- Heifetz, R., Grashow, A., & Linsky, M. (2009). *The practice of adaptive leadership: Tools and tactics for changing your organization and the world*. Harvard Business Press.
- Jensen, U. T. (2022). Digital-era leadership: A framework for public sector transformation. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101729. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101729>
- Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity. *Journal of Applied Psychology*, 89(5), 755–768. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.5.755>

- Kettl, D. F. (2015). *The transformation of governance: Public administration for the twenty-first century* (2nd ed.). Johns Hopkins University Press.
- Khoo, H., & Bujang, A. A. (2013). Transformational leadership and employee creativity: The mediating role of learning orientation. *Journal of Management Development*, 32(7), 874-888. <https://doi.org/10.1108/JMD-05-2013-0056>
- Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Harvard Business School Press.
- Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics. *Human Relations*, 1(2), 143–153. <https://doi.org/10.1177/001872674700100201>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101385>
- Nembhard, I. M., & Edmondson, A. C. (2006). Making it safe: The effects of leaders' behaviors on employee learning and risk taking. *Academy of Management Journal*, 49(6), 1029-1050. <https://doi.org/10.5465/amj.2006.23478715>
- Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and practice* (8th ed.). Sage Publications.
- Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 15(1), 73–101. <https://doi.org/10.1080/13594320500451247>
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance?: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Ospina, S. M., & Foldy, E. G. (2010). Building bridges from the margins: The work of leadership in social change organizations. *The Leadership Quarterly*, 21(2), 292–307. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.02.001>
- Senge, P. M. (2006). *The fifth discipline: The art & practice of the learning organization*. Doubleday.
- Tushman, M. L., & O'Reilly, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. *California Management Review*, 38(4), 8–30. <https://doi.org/10.2307/41165852>

- Van Wart, M. (2013). Administrative leadership theory: A reassessment after 10 years. *Public Administration*, 91(3), 521–543. <https://doi.org/10.1111/padm.12013>
- Vogel, R., & Masal, D. (2015). Public leadership: A review of the literature and framework for future research. *Public Management Review*, 17(8), 1165–1189. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1035292>
- Vroom, V. H., & Jago, A. G. (2007). The role of the situation in leadership. *American Psychologist*, 62(2), 17–24. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.1.17>
- Wang, G., Oh, I.-S., Courtright, S. H., & Colbert, A. E. (2011). Transformational leadership and performance across criteria and levels: A meta-analytic review. *The Leadership Quarterly*, 22(1), 5–25. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.12.009>
- Wright, B. E., & Pandey, S. K. (2010). Transformational leadership in the public sector: Does structure matter? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(1), 75–89. <https://doi.org/10.1093/jopart/mup026>
- Yukl, G. (2010). *Leadership in organizations* (7th ed.). Pearson Education.



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 7: PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MANAJEMEN PUBLIK

Dr. Setyowati Karyaningtyas, S.Sos, M.Si

Universitas Jember

BAB 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Salah satu peran sentral seorang pemimpin yang sangat menentukan pengembangan organisasi ada pada konteks pengambilan keputusan apalagi di era digitalisasi dan arus kecerdasan buatan (AI) saat ini karena pengambilan keputusan yang baik sangat menentukan akan dibawa ke mana organisasi ke depannya. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Herbert Simon (2002), sebagai salah pakar Teori Administrasi dan Pemenang Nobel Teori Pengambilan Keputusan yang menyatakan bahwa: “Kewajiban memutuskan dalam suatu organisasi administratif sama jauhnya seperti yang dilakukan kewajiban” bertindak”. Sebenarnya kewajiban memutuskan terikat secara integral dengan kewajiban bertindak dan suatu teori umum mengenai administrasi harus mencakup prinsip-prinsip organisasi yang menjamin diambilnya keputusan yang benar dan mencakup prinsip-prinsip yang akan menjamin dilakukannya tindakan yang efektif”. Weber (1999), juga memberikan perhatian pada pengambilan keputusan dari segi kehadirannya bahwa tanpa adanya teori pengambilan keputusan administratif, maka kita tidak akan mengerti apalagi meramalkan tindakan-tindakan manajemen sehingga kita tidak dapat mengefektifkan manajemen.

Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap “masalah” yang berarti terjadi penyimpangan antara keadaan dewasa ini dan keadaan yang diinginkan sehingga mengharuskan pemikiran mengenai tindakan alternatif yang harus diambil. Pada tahun 1950, pertama kalinya Herbert A. Simon memakai istilah pengambilan keputusan dalam bukunya yang berjudul *Administrative Behavior* yang sebelumnya diterbitkan di tahun 1947. Setelah dikemukakan oleh Simon, maka penggunaan istilah pengambilan keputusan mulai populer dan digunakan di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, Aspizain., 2017. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia
- Dermawan, Rizky. 2016. *Teori Pengambilan Keputusan*. Bandung. Alfabeta.
- Drucker, P. F. 2012. *Inovasi dan Kewiraswastaan*. Jakarta: Erlangga
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta
- Herbert A. Simon. 2002. *Sistem Pendukung Keputusan*, Jakarta: Rosda
- Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kants, Immanuel *Foundations of Metaphysics of Morals*. Indianapolis: Bobs Merrill
- Koontz.1998. *Manajemen Terjemahan*. Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta: Erlangga
- Kusnadi,dkk. 2005. *Pengantar Manajemen: Konseptual & Perilaku*. Malang: Universitas Brawijaya
- Muktamar at.al. 2023. *Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Kebijakan*. *Journal Of International Multidisciplinary Research Vol:1, No:2 Desember 2023*
- Pasolong, Harbani. 2023. *Teori Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta
- Prasetyawan dan Lestari. 2020. *Pengambilan Keputusan*. Surabaya: Unesa University Press
- Rifa'i, Muhammad. 2020. *Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Kencana
- Rivai, Veithzal. 2022. *Kiat Kepemimpinan dalam Abad ke 21*. Jakarta: Murai Kencana.
- Robbins. Stepen P. 2003. *Manajemen*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta : PT Indeks
- Robbins, P. Stephen dan Coulter Mary. 1999 *Manajemen*. Edisi Bahasa Indonesia, PT. Prehalindo. Jakarta
- Robbins, P. Stephen dan Toty A. Judge, 2008. *Perilaku Organisasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Salemba Empat

- Sabri, A. 2013. *Kebijakan dan Pengambilan Keputusan dalam Lembaga Pendidikan Islam*
- Siagian, Sondang. 1988. *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siebert, Johannes Ulrich., Reinhard E. Kunz, Philipp Rolf, 2018, Effects of Proactive Decision Making on Life Satisfaction, *European Journal of Operational Research*, <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.08.011>
- Simon, Herbert A. 1993. *Decision Making: Rational Nonrational and Irrational*. *Jurnal Educational Administration Quarterly* Vol. 29 No.3.
- Snyder, R. C. 1962. *Foreign Policy Decision- Making: An Approach to the Study of International Politics*. New York: Glencoe
- Steiner, A. George.2010.*Kebijakan Strategi Manajemen*, terj. Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta: Erlangga
- Sunarto.2004. *Perilaku Organisasi*.Yogyakarta: Amus.
- Sudarmo. 2000. *Produktivitas Organisasi*. Yogyakarta : BPFE
- Supranto, J. 2005. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Terry, George R. 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman, Husaeni. 2016. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Weber, Ron. 1999. *Information System Control and Audit*. *The university of Queensland, Prentice Hall Inc. New Jearsey*



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 8: PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PUBLIK

Dr. Wydha Mustika Maharani, S.AP., M.AP

Administrasi Negara, FISIP- Universitas Jember

BAB 8

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PUBLIK

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di sektor publik memiliki peran vital dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien. Salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), yang mencerminkan ketidakpastian dan perubahan cepat dalam lingkungan sektor publik. Tantangan ini semakin meningkat pasca-pandemi COVID-19, yang memaksa sektor publik beradaptasi dengan cara kerja dan penyampaian layanan yang baru. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat, seperti penggunaan aplikasi digital, *big data*, dan kecerdasan buatan (AI), semakin mempengaruhi cara pemerintah melayani masyarakat. Perubahan sosial dan politik juga turut memperburuk tantangan ini, memaksa sektor publik untuk siap menghadapi krisis dan perubahan kebijakan.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif semakin tinggi. Masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang cepat, tanpa hambatan, dan berbasis teknologi terkini. Untuk memenuhi harapan ini, sektor publik bergantung pada kapasitas SDM yang ada. SDM yang mampu beradaptasi, mengelola kompleksitas, dan memberikan solusi yang tepat waktu sangat penting. Oleh karena itu, sektor publik harus memaksimalkan potensi SDM melalui rekrutmen yang tepat dan pelatihan yang relevan untuk mendukung perubahan teknologi dan kebijakan yang terus berkembang.

A. DEFINISI DAN KONSEP MANAJEMEN SDM PUBLIK

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sektor publik mencakup seluruh aspek pengelolaan tenaga kerja di organisasi pemerintahan, mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga evaluasi kinerja. Ivancevich (1990) dalam bukunya *Human Resource Management* menjelaskan bahwa HRM

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. (2010). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (11th ed.). Kogan Page.
- Byars, L. L., & Rue, L. W. (2008). *Human resource management* (9th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Boxall, P. F., & Purcell, J. (2003). *Strategy and human resource management*. Palgrave Macmillan.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Ivancevich, J. M. (1990). *Human resource management* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara*.
<https://www.menpan.go.id>
- Lawler III, E. E. (2003). *Treat people right! How organizations and individuals can achieve true fulfillment at work*. Jossey-Bass.
- Lan, Z., & Lu, Y. (2005). Performance appraisal problems in the public sector: A case study of a Chinese municipal government. *Public Administration Review*, 65(3), 329-341.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00456.x>
- Rainey, H. G. (2014). *Understanding and managing public organizations* (5th ed.). Jossey-Bass.



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 9: PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT

Muhamad Nanda Al Hakim Akbar, S.AP., M.AP

Administrasi Negara, FISIP- Universitas Jember

BAB 9

PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Publik atau *Public Financial Management* merupakan pondasi esensial yang menopang seluruh arsitektur tata kelola pemerintahan modern. Ia dapat didefinisikan sebagai sistem yang komprehensif, mencakup seluruh siklus penggunaan sumber daya publik—mulai dari penghimpunan pendapatan, perencanaan dan pengalokasian anggaran, pelaksanaan belanja, hingga akuntansi, pelaporan, dan audit. Jauh melampaui sekadar fungsi pembukuan atau perbendaharaan, Pengelolaan Keuangan Publik adalah mekanisme penting untuk mewujudkan kebijakan politik dalam alokasi anggaran yang nyata, dan janji pelayanan publik diwujudkan menjadi kenyataan yang dirasakan oleh warga negara. Dalam esensinya, pengelolaan keuangan publik adalah tentang bagaimana pemerintah mengelola uang rakyat secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kualitas sistem pengelolaan keuangan publik suatu negara secara langsung menentukan kapasitas pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, memberikan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur, serta pada akhirnya, memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari publik yang dilayaninya.

Pentingnya pengelolaan keuangan publik yang solid dapat ditinjau dari tiga aspek utama. Pertama, dimensi stabilitas makroekonomi. Pengelolaan keuangan publik yang disiplin adalah prasyarat untuk keberlanjutan fiskal. Kapasitas pemerintah untuk menyusun anggaran yang kredibel, mengendalikan defisit, dan mengelola utang secara bijaksana (*prudent debt management*) berdampak langsung pada stabilitas harga, nilai tukar, dan suku bunga. Ketidakteraturan dalam manajemen fiskal dapat memicu krisis ekonomi, menekan daya beli masyarakat, dan menciptakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Cetakan 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, M. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah: Analisis Rasio dan Kinerja*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- OECD. (2023). *PISA 2022 Result (Colume I): The State of Learning and Equity in Education*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Squire, S. J., & Beazley, J. I. (2016). *Increasing Professionalism in Public Finance Management: A Case Study of the United Kingdom*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25276>
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). *Partisipasi masyarakat terhadap perwujudan good governance di desa damai kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang*. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 7(3), 88-92. <https://doi.org/10.51817/prj.v7i3.374>
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 10: BUKU STRATEGI DALAM MANAJEMEN PUBLIK

Yaen Miftakhul Laily, S.A.P., M.AP

Administrasi Negara, FISIP- Universitas Jember

BAB 10

BUKU STRATEGI DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ia berperan sebagai pedoman dalam merumuskan tindakan-tindakan strategis untuk mengatasi berbagai persoalan publik yang kompleks dan dinamis. Dalam era modern yang ditandai oleh percepatan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, pemerintah dituntut untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan transparan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan publik tidak hanya penting bagi para birokrat dan politisi, tetapi juga bagi akademisi, mahasiswa, dan seluruh warga negara yang ingin turut serta membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.

Buku ini disusun sebagai panduan komprehensif untuk memahami dinamika kebijakan publik dari berbagai aspek. Dimulai dari definisi dasar dan karakteristik kebijakan publik, pembaca diajak untuk memahami proses siklus kebijakan yang mencakup tahapan identifikasi masalah, formulasi, pengesahan, implementasi, hingga evaluasi. Setiap tahapan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam membentuk satu proses yang berkesinambungan dan dinamis. Pemahaman terhadap siklus ini menjadi kunci untuk menilai efektivitas suatu kebijakan dalam menjawab permasalahan publik. Selanjutnya, buku ini juga mengulas secara mendalam peran *stakeholder* dalam proses kebijakan. Keterlibatan berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, hingga media massa menjadi penting dalam membentuk kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Partisipasi para pemangku kepentingan tidak hanya memberikan legitimasi pada proses kebijakan, tetapi juga

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R. (2024). Pemetaan penyebab persistensi korupsi di sektor publik. *Peradaban j econ bus*, 3(1), 23-38. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v3i1.156>
- Blanchard, C., Petrella, R. J., Kupperman, J., & Gill, D. P. (2015). Community capacity-building to improve the implementation of a policy promoting physical activity and healthy eating in Canada: A longitudinal qualitative study. *Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada: Research, Policy and Practice*, 35(8–9), 121–129.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Edison, E. and Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial: tinjauan terhadap kebijakan pembangunan di indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134-146. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>
- Gatete, K., & Dabat, M. H. (2017). Stakeholder involvement in policy evaluation: The case of the coffee subsector in Rwanda. *Food Security*, 9(3), 479–491. <https://doi.org/10.1007/s12571-017-0667-z>
- Geer, B. W. (2023). Stakeholder participation and trust in government: A comparative perspective. *Policy & Politics*, 51(2), 239–257. <https://doi.org/10.1332/030557321X16533939940444>
- Hapsari, N., Waris, I., & Alamasyah, N. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan minerba di kelurahan poboya, kecamatan mantikulore kota palu. *CENDEKIA*, 1(5), 240-253. <https://doi.org/10.62335/er90st86>
- Hendricks, R. Q., Wale, J., & Hill, M. (2022). Evidence-informed policymaking through stakeholder engagement. *International Journal of Health Policy and Management*, 11(6), 846–855.

- Jannah, R., Purnomo, A., & Nugraha, A. (2023). Evaluasi penerapan kebijakan eazy passport pada kantor imigrasi kelas i tpi bengkulu. *Journal of Administration and International Development*, 3(1), 1-22. <https://doi.org/10.52617/jaid.v3i1.397>
- Jēkabsons, I. (2019). The role of civil society organizations in policy monitoring and evaluation. *Latvian Journal of Public Policy*, 9(1), 45–61.
- Juma, P. A., Mohamed, S. F., Matanje Mwagomba, B. L., Ndinda, C., Mapa-Tassou, C., Oluwasanu, M., Oladepo, O., Maluka, S., & Mbanya, J. C. (2018). Multi-sectoral action in non-communicable disease prevention policy development in five African countries. *BMC Public Health*, 18(1), 1–11.
- Manganti, G. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. *DeCive*, 3(11). <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>
- Naude, C. E., Zani, B., Ongolo-Zogo, P., Wiysonge, C. S., Dudley, L., Kredo, T., Garner, P., & Rohwer, A. (2015). Research evidence and policy: Qualitative study in selected provinces in South Africa and Cameroon. *Implementation Science*, 10, 126.
- Oktavia, L., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.29210/3003909000>
- Pamungkas, S., Daffaakbar, M., & Nurrizky, A. (2022). Analisis tata kelola kebijakan sosial penanganan pandemi covid-19 di indonesia berdasarkan perspektif adaptive governance. *Journal of Social Development Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/jsds.5226>
- Rasesemola, R. M. (2023). Public consultation and inclusivity in policymaking: A South African perspective. *African Journal of Public Affairs*, 15(1), 35–50.
- Rasheed, M. A., Yousaf, S., & Noor, A. (2017). Role of stakeholders in policy formulation: A case of health policy in Pakistan. *International Journal of Public Administration*, 40(6), 512–521.
- Rasya, H. and Triadi, I. (2024). Akses keadilan dan kesenjangan sosial: transformasi melalui peran hukum tata negara. *ijlj*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>

- Riyanto, M. and Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Sari, R. (2019). Analisis kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. *Produ Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3326>
- Sarjito, A. (2024). Efektivitas kebijakan sosial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1-12. <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90>
- Schalk, J. (2015). The logic of policy participation: Political actors and the dynamics of public involvement. *Public Administration Review*, 75(1), 65–75.
- Seftyono, C. (2018). Politik kebijakan publik: pengantar untuk mahasiswa dan peneliti pemula (draft).. <https://doi.org/10.31235/osf.io/qy6ns>
- Sharma, R., & Kumar, P. (2023). Stakeholder analysis in public policy: Framework and applications. *Journal of Policy Studies*, 28(2), 101–118.
- Situmorang, N., Thamrin, M., & Nadjib, A. (2021). Successful approach implementasi talent mapping: studi pada pfa di bpkp. *Matra Pembaruan*, 5(1), 39-51. <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.39-51>
- Spitters, H., Lau, C. J., Sandu, P., Folkvord, F., & van Oers, H. (2017). Unravelling networks in local public health policymaking in three European countries: A systems analysis. *Health Research Policy and Systems*, 15, 5.
- Suciptaningsih, O. (2010). Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di kabupaten kendal. *Komunitas International Journal of Indonesian Society and Culture*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2276>

- Sumarsono, C., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2022). Analisis model implementasi kebijakan publik pada pemerintah desa di kecamatan dau kabupaten malang. *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 228-249. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.8344>
- Surachman, A., Novita, D., & Hartati, D. (2020). Sinergi multisektor dalam implementasi kebijakan kesehatan: Studi kasus penanggulangan penyakit tidak menular di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 90–98.
- Suryono, A. (2018). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>
- Talley, R. C., Goldstein, J., & Schaffer, M. (2016). Evaluating health policy implementation: Engaging stakeholders to improve outcomes. *Health Policy Open*, 7(1), 55–62.
- Tresiana, N. (2015). Rasionalitas kebijakan pemekaran kecamatan dan kelurahan di kota bandar lampung. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 161-171. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.161-171>
- Zulaika, S., Harsono, I., Mahmudin, T., Yahya, A., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh kebijakan pemerintah dan kemitraan bisnis dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan terhadap kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi di sulawesi selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(01), 41-55. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i01.944>



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 11: AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN PUBLIK

Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.

Universitas Wijaya Putra

BAB 11

AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang konsep akuntabilitas, jenis-jenis akuntabilitas, *instrument* akuntabilitas, akuntabilitas vertikal dan horizontal, peran akuntabilitas dalam *good governance* serta hubungan akuntabilitas dengan kinerja. Materi dalam bab ini menjadi menarik dan perlu dipelajari mengingat konsep akuntabilitas belum banyak dipahami terutama dalam implementasinya yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan *good governance*. Masih banyak penyimpangan dalam pelayanan publik, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme, disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas.

Masih rendahnya akuntabilitas antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang ditandai dengan rendahnya indeks persepsi korupsi dibandingkan dengan Negara-negara lain di Asia. Indeks persepsi korupsi (IPK) diukur dari 0 sampai 100 di antara 180 Negara di dunia, semakin tinggi skor maka Negara tersebut semakin bersih dari perilaku korupsi. Berdasarkan data *Transparency International Indonesia* (transparansi.id, 2024), IPK Indonesia berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, bahkan disbanding dengan Timor Leste. IPK Singapura berada di angka 83 pada tahun 2023. Berikutnya Malaysia dengan skor 50, Timor Leste dengan skor 43, Vietnam dengan skor 41, Thailand dengan skor 35, sedangkan Indonesia dengan skor 34. Angka tersebut stagnan selama tahun 2022, 2023, dan 2024. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya komitmen untuk menegakkan akuntabilitas publik di Indonesia.

Dengan memahami konsep akuntabilitas ini, aparatur negara dan masyarakat dapat lebih kritis dalam mengawasi serta mencegah tindakan yang merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, memahami konsep akuntabilitas sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Penerapan

DAFTAR PUSTAKA

- Chandler, Ralph C, dan Plano, Jack C, 1988, The Public Administration Dictionary. John Wiley & Sons
- Corbett, C. (2022). Accountability and Ethics in Nonprofit Organizations. In: Farazmand, A. (eds) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_2583
- Denhardt, Janet V. & Denhardt, Robert B. 2007. *The New Public Service : Serving, Not Steering* (expanded edition). Armonk. New York: M.E. Sharpe Inc.
- Graham, C., et al. (2023). Equality and Public Accountability in Governance: A Global Perspective. *Governance Journal*, 39(2), 120-145.
- Hood, C. (2023). Accountability and Transparency in Public Administration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(2), 215-232.
- Hunold, C. 2001. Corporatism, Pluralism, and Democracy: Toward a Deliberative Theory of Bureaucratic Accountability. *An International Journal of Policy an Administration*, Vol. 14, No. 2, April, 151-167
- Janssen, M., & Helbig, N. (2023). E-Government and Citizen Participation: The Estonian Experience. *Information Polity*, 28(3), 199-218.
- Klitgaard, R. *Adjusting to Reality: Beyond "State Versus Market" in Economic Development* (San Francisco: International Center for Economic Growth, 1991), pp. 141-42.
- Kumar, R. (2023). Social Inclusion and Governance: Challenges in Ensuring Equal Rights. *Policy Studies Review*, 22(4), 89-110.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Meijer, A. (2022). Digital Accountability in the Public Sector: A Comparative Study. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101-113.

- Mulgan, Richard. "The Processes of Public Accountability." *Australian Journal of Public Administration* 56 (1997): 25-36.
- Przeworski A, Stokes SC, Manin B, eds. *Democracy, Accountability, and Representation*. Cambridge University Press; 1999.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Rodriguez, P. (2023). Transparency and Equality in Public Budgeting. *Journal of Government Finance*, 18(3), 56-74.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238. <https://doi.org/10.2307/975901>
- Santoso, B. (2024). Corruption and Public Accountability in Indonesia: An Analysis of KPK's Role. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 55-78.
- Setiawan, R. (2023). The Impact of E-KTP Implementation on Public Administration Efficiency in Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik*, 14(2), 88-102.
- Shafritz, Jay M, and Hyde, Albert C. 1997. *Classics of Public Administration*. Cengage Learning US.
- Smith, J., & Brown, L. (2024). Inclusive Governance: The Role of Equal Rights in Public Administration. *Journal of Public Policy*, 28(1), 77-95.
- UNDP. 1997. Reconceptualising Governance: Discussion Paper No. 2.
- Uhr, John (2014). Accountable Civil Servants. In Mark Bovens, Robert E. Goodin & Thomas Schillemans, *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press.
- Vigoda, E. (2002) From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public Administration. *Public Administration Review*, 62, 527-540. <http://dx.doi.org/10.1111/1540-6210.00235>
- Wasistiono, S. 2007. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.
- Waterford, Jack . 1991. A Bottom Line On Public Service Accountability. *Australian Journal of Public Administration*. Vol. 50. No. 3. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1991.tb02304.x>



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 12: TRANSPARANSI DALAM MANAJEMEN PUBLIK

Fajri Maulana

Administrasi Negara, FISIP- Universitas Jember

BAB 11

TRANSPARANSI DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. KONSEP TRANSPARANSI

Definisi transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dan atau lembaga publik dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terkait proses, kebijakan, dan penggunaan sumber daya. Transparansi sendiri merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana ditegaskan oleh (World Bank, 1992) yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap informasi, serta pertanggungjawaban atas tindakan publik. Dalam pandangan (Rosenbloom, 1989), transparansi erat kaitannya dengan prinsip *public accountability* di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan secara terbuka kepada publik. Lebih jauh lagi, transparansi bukan sekadar akses terhadap informasi, tetapi juga menyangkut pemahaman masyarakat terhadap sebuah proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Konsep ini juga mencerminkan perubahan paradigma dari *government* menjadi *governance*, di mana menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek layanan, tetapi sebagai aktor penting dalam siklus kebijakan (Boyte, 2005; Gedeona, 2010; Mahomed Karodia, 2014). Fungsi transparansi di sini adalah memperkuat partisipasi publik dengan menyediakan data dan informasi yang relevan dan dapat diverifikasi.

Dalam konteks demokrasi modern, transparansi dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Fukuyama, (2013) menegaskan bahwa transparansi dalam institusi publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa transparansi, masyarakat cenderung merasa curiga dan tidak percaya terhadap kinerja pemerintah. Kepercayaan yang lemah ini pada akhirnya dapat



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 13: KOLABORASI DAN KEMITRAAN DALAM MANAJEMEN PUBLIK

Dr. Masadib Akmal Vyandri, S.AP., M.A.P

Administrasi Negara, FISIP- Universitas Jember

BAB 13

KOLABORASI DAN KEMITRAAN DALAM MANAJEMEN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Dalam konsep manajemen publik modern, kolaborasi antar sektor telah menjadi pilar fundamental dalam tata Kelola pemerintahan yang harus diimplementasikan oleh berbagai level pemerintahan untuk meningkatkan legitimasi kebijakan. Perubahan ini didorong karena berbagai tuntutan seperti pentingnya keterlibatan masyarakat agar suara mereka didengar untuk mengatasi masalah publik. Masyarakatlah yang mengerti berbagai masalah yang dihadapi mereka, dan untuk mengatasi masalah tersebut, penting adanya keterlibatan masyarakat untuk mengatasi berbagai Isu seperti pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik seperti kesehatan, perbaikan jalan, dan pengentasan kemiskinan.

Kolaborasi dalam manajemen publik merujuk pada proses di mana aktor-aktor dari berbagai sektor – pemerintah (pusat, daerah, desa), swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan bahkan individu – bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi, setiap *stakeholders* dapat berbagi informasi, sumber daya, keahlian, dan tanggung jawab. Sementara itu, kemitraan dapat dipahami sebagai bentuk formal dari kolaborasi. Bentuk formal dari kolaborasi yang pasti terdapat perjanjian yang disepakati bersama untuk memfasilitasi kerja sama jangka Panjang (Collins et al., 2024; Zhang, 2024) .

Pendekatan kolaboratif dan kemitraan ini dapat memberikan berbagai keuntungan. Pertama, memungkinkan optimalisasi sumber daya dengan menyatukan aset dari berbagai *stakeholders*. Kedua, dapat mendorong inovasi melalui pertukaran berbagai ide dan perspektif, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan relevan. Ketiga, mereka meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil, meningkatkan akuntabilitas, dan kepuasan publik, karena melibatkan lebih *stakeholders*

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, A., & Sørensen, E. (2018). Managing collaborative innovation in public bureaucracies. *Planning Theory*, 17(1), 53–73. <https://doi.org/10.1177/1473095216672500>
- Andrew Sayer. (2011). *Why Things Matter to People: Social Science, Values and Ethical Life*. Cambridge University Press,.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bostaph, L. M. G., & Wintrow, M. (2021). We Can Move Mountains: Engaging in State-Level Policy Work. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 37(2), 212–220. <https://doi.org/10.1177/1043986221999860>
- Brandenberger, L., Ingold, K., Fischer, M., Schläpfer, I., & Leifeld, P. (2022). Boundary Spanning Through Engagement of Policy Actors in Multiple Issues. *Policy Studies Journal*, 50(1), 35–64. <https://doi.org/10.1111/psj.12404>
- Brown, P. R. (2017). Attempting to Cultivate Mindsets for Boundary Spanning in Remote Indigenous Policy. *Australian Journal of Public Administration*, 76(4), 412–425. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12287>
- Cain, B. E., Gerber, E. R., & Hui, I. (2021). Public Perceptions of Collaborative Governance in Transportation Policy. *Political Research Quarterly*, 74(4), 899–912. <https://doi.org/10.1177/1065912920943954>
- Collins, B., Garbacz, S. A., & Powell, T. (2024). Reframing family-school partnerships to disrupt disenfranchisement of Black families and promote reciprocity in collaboration. *Journal of School Psychology*, 104, 101290. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2024.101290>
- Deslatte, A., & Swann, W. L. (2020). Elucidating the Linkages Between Entrepreneurial Orientation and Local Government Sustainability Performance. *American Review of Public Administration*, 50(1), 92–109. <https://doi.org/10.1177/0275074019869376>

- Gebo, E., & Bond, B. J. (2016). Comparing Determinants of Effective Collaboration in a Comprehensive Crime Reduction Initiative. *Journal of Policy Practice*, 15(3), 212–232. <https://doi.org/10.1080/15588742.2015.1044688>
- Grimm, H. M., & Bock, C. L. (2022). Entrepreneurship in public administration and public policy programs in Germany and the United States. *Teaching Public Administration*, 40(3), 322–353. <https://doi.org/10.1177/01447394211021636>
- Hafer, J. A. (2018). Understanding the Emergence and Persistence of Mandated Collaboration: A Policy Feedback Perspective of the United States's Model to Address Homelessness. *American Review of Public Administration*, 48(7), 777–788. <https://doi.org/10.1177/0275074017729877>
- Handoko, W., Sulaiman, A. I., Sugito, T., & Sabiq, A. (2024). Empowering Former Women Migrant Workers: Enhancing Socio-Economic Opportunities and Inclusion for Sustainable Development. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 13(1), 199. <https://doi.org/10.36941/ajis-2024-0015>
- Judith E. Innes, & David E. Booher. (2018). *Planning with Complexity An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy* (2nd ed.). Routledge.
- Landstad, B. J., Kvangarsnes, M., Hole, T., Walderhaug, N., & Strand, A. M. S. (2024). Municipal Acute Bed Units as a Health Service Innovation—A Qualitative Study. *Journal of Health Management*, 26(4), 661–668. <https://doi.org/10.1177/09720634241235511>
- Lim, S., & Rahmani, R. (2020). Toward Semantic IoT Load Inference Attention Management for Facilitating Healthcare and Public Health Collaboration: A Survey. *Procedia Computer Science*, 177, 371–378. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.10.050>
- Martin, A., Fischer, A., & McMorran, R. (2023). Who decides? The governance of rewilding in Scotland 'between the cracks': community participation, public engagement, and partnerships. *Journal of Rural Studies*, 98, 80–91. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.01.007>

- Masonta, M. T., Kliks, A., & Mzyece, M. (2017). Unlocking the potential of unoccupied spectrum in developing countries: Southern African Development Community – case study. *Development Southern Africa*, 34(2), 224–244. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2016.1259985>
- Meng, A., DiSalvo, C., Tsui, L., & Best, M. (2019). The social impact of open government data in Hong Kong: Umbrella Movement protests and adversarial politics. *Information Society*, 35(4), 216–228. <https://doi.org/10.1080/01972243.2019.1613464>
- Mills, J., Abel, J., Kellehear, A., & Patel, M. (2021). Access to palliative care: the primacy of public health partnerships and community participation. *The Lancet Public Health*, 6(11), e791–e792. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00213-9](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00213-9)
- Ollerenshaw, A., Murphy, A., & McDonald, K. (2017). Leading the way: the integral role of local government within a multisector partnership delivering a large infrastructure project in an Australian growth region. *Local Government Studies*, 43(2), 291–314. <https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1274259>
- Pihl-Thingvad, S. (2016). The Inner Workings of Performance Management in Danish Job Centers: Rational Decisions or Cowboy Solutions? *Public Performance and Management Review*, 40(1), 48–70. <https://doi.org/10.1080/15309576.2016.1177556>
- Ramadhan, A., Salim, W., & Argo, T. A. (2020). Collaborative Approach For Coastal and Marine Spatial Planning in Indonesia: Opportunity and Challenge. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 501(1), 012011. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/501/1/012011>
- Riaz, B. K., Ali, L., Ahmad, S. A., Islam, M. Z., Ahmed, K. R., & Hossain, S. (2020). Community clinics in Bangladesh: A unique example of public-private partnership. *Heliyon*, 6(5), e03950. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03950>
- Sarkar, D., & Sheth, A. (2023). Public private partnership model for sustainable bus rapid transit system in Ahmedabad, India. *International Journal of Construction Management*, 23(7), 1233–1243. <https://doi.org/10.1080/15623599.2021.1966579>

- Shi, S.-J. (2017). The bounded welfare pluralism: public-private partnerships under social management in China. *Public Management Review*, 19(4), 463–478. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1183700>
- Siagian, E. S., Sumaryana, A., Widianingsih, I., & Nurasa, H. (2019). Public-private partnerships in solid waste management: arrangements in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 41(1), 56–62. <https://doi.org/10.1080/23276665.2019.1592845>
- Silvestre, H. C., Marques, R. C., Dollery, B., & Correia, A. M. (2020). Is cooperation cost reducing? An analysis of public-public partnerships and inter-municipal cooperation in Brazilian local government. *Local Government Studies*, 46(1), 68–90. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1615462>
- Silvestre, H. C., Marques, R. C., & Gomes, R. C. (2018). Joined-up Government of utilities: a meta-review on a public-public partnership and inter-municipal cooperation in the water and wastewater industries. *Public Management Review*, 20(4), 607–631. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1363906>
- Sun, C., Jin, J., Nainar, K., & Lobo, G. (2024). Does firms' corporate social responsibility reduce crime? *International Review of Economics & Finance*, 96, 103719. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103719>
- Ulibarri, N. (2015). Collaboration in Federal Hydropower Licensing: Impacts on Process, Outputs, and Outcomes. *Public Performance & Management Review*, 38(4), 578–606. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031004>
- Yabutani, Y., & Yamada, N. (2023). Conditions facilitating the participation of residents of older apartment complexes in community activities in Japan: basic study on community support measures. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 22(1), 32–49. <https://doi.org/10.1080/13467581.2021.2008399>
- Zhang, Y. (2024). Role of green finance, green bonds, public private partnership, and technology innovation in carbon neutrality and sustainable development. *Heliyon*, 10(18), e37189. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37189>



MANAJEMEN PUBLIK

BAB 14: MANAJEMEN RESIKO SEKTOR PUBLIK

Dr. R. Sally Marisa Sihombing, S.I.P., M.Si

FISIP USU SUMATERA UTARA

BAB 14

MANAJEMEN RESIKO SEKTOR PUBLIK

A. MANAJEMEN RESIKO

Manajemen risiko didefinisikan sebagai kegiatan atau upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam suatu operasi atau organisasi dikenal sebagai manajemen risiko. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang dapat menguntungkan.

Dimensi manajemen publik dalam administrasi publik banyak mengartikan bahwa terjadinya proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi publik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi layanan publik, kebijakan, dan program yang dijalankan. Kebijakan yang tidak efektif, penyalahgunaan anggaran, kegagalan proyek, dan ketidakpastian ekonomi dan politik adalah beberapa sumber risiko dalam sektor publik.

Manajemen Risiko dalam Manajemen Publik merupakan upaya meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan lancar tanpa masalah besar. Manajemen risiko juga merupakan upaya pencegahan penyalahgunaan anggaran dengan menurunkan risiko korupsi dan kebocoran serta melalui mekanisme pengawasan yang lebih baik. Manajemen risiko juga meningkatkan kepercayaan publik dengan memberi orang keyakinan bahwa organisasi publik beroperasi secara transparan dan akuntabel. Sehingga organisasi publik dapat menghadapi krisis yang lebih baik dan mempersiapkan diri untuk bencana, ketidakstabilan ekonomi, serta krisis yang lainnya. Manajemen publik juga dapat bekerja lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan menerapkan manajemen risiko yang benar dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acebes, F., González-Varona, J., López-Paredes, A., & Pajares, J. (2024). Beyond probability-impact matrices in project risk management: A quantitative methodology for risk prioritisation. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 1-13.
- Ahmeti, R., & Vladi, B. (2017). Risk Management in Public Sector: A Literature Review. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 5, 323-329.
- Ainsworth, S. (2020). Rational Choice Theory in Political Decision Making
- Azzahra, A., Savandha, S., & Olubisi, M. (2024). Effective Strategies for Corporate Governance and Risk Management in the Public Sector: Preventing Corruption and Abuse of Authority. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*.
- Baharuddin, B., & Yusof, M. (2018). Evaluation of Risk Management Practices in Information Systems Project in the Public Sector. *Jurnal Pengurusan UKM Journal of Management*, 53, 23-36.
- Baldry, D. (1998). The evaluation of risk management in public sector capital projects. *International Journal of Project Management*, 16, 35-41
- Barafort, B., Mesquida, A., & Mas, A. (2018). ISO 31000-based integrated risk management process assessment model for IT organizations. *Journal of Software: Evolution and Process*, 31.
- Barki, H., Rivard, S., & Talbot, J. (2001). An Integrative Contingency Model of Software Project Risk Management. *Journal of Management Information Systems*, 17, 37 - 69.
- Bovaird, T., & Quirk, B. (2016). Resilience in public administration: moving from risk avoidance to assuring public policy outcomes. **, 280-292.
- Bracci, E., Mouhcine, T., Rana, T., & Wickramasinghe, D. (2021). Risk management and management accounting control systems in

- public sector organizations: a systematic literature review. *Public Money & Management*, 42, 395 - 402.
- Bracci, E., Tallaki, M., Gobbo, G., & Papi, L. (2021). Risk management in the public sector: a structured literature review. *International Journal of Public Sector Management*
- Butenko, H. (2024). Risk management technology in the public sector: challenges and opportunities. *Economics. Finances. Law.*
- Chen, X., & Sharab, J. (2020). Risk evaluation with rectangular random walk. **, 11425, 11425OR - 11425OR-14.
- Dali, A., & Lajtha, C. (2012). ISO 31000 Risk Management— “The Gold Standard”. *EDPACS*, 45, 1 - 8.
- Djenadic, S., Tanasijević, M., Jovancic, P., Ignjatović, D., Petrović, D., & Bugaric, U. (2022). Risk Evaluation: Brief Review and Innovation Model Based on Fuzzy Logic and MCDM. *Mathematics*.
- Djenadic, S., Tanasijević, M., Jovancic, P., Ignjatović, D., Petrović, D., & Bugaric, U. (2022). Risk Evaluation: Brief Review and Innovation Model Based on Fuzzy Logic and MCDM. *Mathematics*.
- Domokos, L., Nyéki, M., Jakovác, K., Németh, E., & Hatvani, C. (2015). Risk Analysis and Risk Management in the Public Sector and in Public Auditing. *Public Finance Quarterly*, 60, 7-28.
- Douglas W. Hubbard dalam bukunya "The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It" (2009)
- Drennan, L., McConnell, A., & Stark, A. (2007). Risk and Crisis Management in the Public Sector.
- Drennan, L., McConnell, A., & Stark, A. (2007). Risk and Crisis Management in the Public Sector. **.
- Duit, A. (2016). RESILIENCE THINKING: LESSONS FOR PUBLIC ADMINISTRATION. *Public Administration*, 94, 364-380.

- Erfani, A., & Cui, Q. (2022). Predictive risk modeling for major transportation projects using historical data. *Automation in Construction*.
- Essentials of Insurance: A Risk Management Perspective, by Emmett Vaughan and Theresa Vaughan (John Wiley & Sons, Inc., 1995).
- Fone, M., & Young, P. (2001). Public Sector Risk Management.
- Gani, A., Salim, B., & Udin, N. (2020). The Significance of Policy and Guidelines on Risk Management Implementation and Development in Malaysian and United Kingdom Public Sector. *Journal of Functional Analysis*, 8, 83.
- George, C. (2020). The Essence of Risk Identification in Project Risk Management: An Overview. *International Journal of Science and Research (IJSR)*.
- Ghuman, B. (2001). New Public Management: Theory and Practice. *The Indian Journal of Public Administration*, 47, 769 - 779
- Grassi, A., Gamberini, R., Mora, C., & Rimini, B. (2009). A fuzzy multi-attribute model for risk evaluation in workplaces.. *Safety Science*, 47, 707-716.
- Griggs, S. (2006). 13 Rational Choice in Public Policy: The Theory in Critical Perspective. **, 199-212.
- Hansen, J., & Ferlie, E. (2016). Applying Strategic Management Theories in Public Sector Organizations: Developing a typology. *Public Management Review*, 18, 1 - 19.
- Hardjomidjojo, H., Pranata, C., & Baigorria, G. (2022). Rapid assessment model on risk management based on ISO 31000:2018. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1063.
- Hay, C. (2004). Theory, Stylized Heuristic or Self-Fulfilling Prophecy? The Status of Rational Choice Theory in Public Administration. *Public Administration*, 82, 39-62.

- Hillson, D. (2009). Managing Risk in Projects.
- Hunt, B. (2010). Risk and Crisis Management in the Public Sector. *Public Management Review*, 12, 747 - 751.
- Ibadildin, N., Malik, A., Kenzhin, Z., Mukina, G., & Shadiyeva, A. (2025). Risk Management in the Public Sector: A Bibliographic Literature Review. *Economy: strategy and practice*.
- ISO 31000 (2018): Pedoman Standar Internasional Manajemen Risiko
- Jereb, B., Knez, M., Kukovič, D., Cvahte, T., & Obrecht, M. (2016). Risk management according to ISO 31000. **, 100-111.
- John, P. (2020). Explaining Policy Change. *Making Policy Happen*. <https://doi.org/10.4324/9781003060697-3>
- Jones, B. (2003). Bounded Rationality and Political Science: Lessons from Public Administration and Public Policy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 13, 395-412.
- Kerzner, H. (1999). Applied Project Management: Best Practices on Implementation. Kerzner, H. (2018). The future of project management. *Revista de Gestão e Projetos*.
- Kerzner, H. (2018). The future of project management. *Revista de Gestão e Projetos*.
- Knight, D. J. C. (2002). *Risk Analysis in System Engineering*.
- Kolisch, R. (2010). Managing risk in projects—fundamentals of project management, by D. Hillson. *International Journal of Production Research*, 48, 5547 - 5548.
- Koloskova, M. (2024). ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN PUBLIC GOVERNMENT SECTOR ORGANIZATIONS. *EKONOMIKA I UPRAVLENIE: PROBLEMY, RESHENIYA*.
- Luko, S. (2013). Risk Management Principles and Guidelines. *Quality Engineering*, 25, 451 - 454.

- Lyukevich, I., Agranov, A., Lvova, N., & Guzikova, L. (2020). Digital Experience: How to Find a Tool for Evaluating Business Economic Risk. *International Journal of Technology*.
- Mahama, H., Elbashir, M., Sutton, S., & Arnold, V. (2020). Enabling enterprise risk management maturity in public sector organizations. *Public Money & Management*, 42, 403 - 407.
- Manning, N. (2001). The Legacy of the New Public Management in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 67, 297 - 312.
- Maskrey, S., Mount, N., Thorne, C., & Dryden, I. (2016). Participatory modelling for stakeholder involvement in the development of flood risk management intervention options. *Environ. Model. Softw.*, 82, 275-294.
- Matei, A., & Dogaru, T. (2012). The Rationality of Public Policies - An Analytical Approach. *Political Institutions: Bureaucracies & Public Administration eJournal*.
- Mathiasen, D. (1999). The new public management and its critics. *International Public Management Journal*, 2, 90-111.
- Meskauskas, Z., & Kazanavičius, E. (2022). About the New Methodology and XAI-Based Software Toolkit for Risk Assessment. *Sustainability*.
- Mikes, A., & Kaplan, R. (2013). Towards a Contingency Theory of Enterprise Risk Management. *Managerial Accounting eJournal*.
- Monteduro, F., Cecchetti, I., Lai, Y., & Allegrini, V. (2020). Does stakeholder engagement affect corruption risk management?. *Journal of Management and Governance*, 25, 759 - 785.
- Moosa, I. (2007). The Science of Risk Management. **, 1-25.
- Nwangwu, G. (2019). Stakeholder Opposition Risk in Public-Private Partnerships. *International Journal of Economics and Financial Research*

- Palanisamy, R., Norman, A., & Kiah, M. (2021). BYOD Security Risks and Mitigation Strategies: Insights from IT Security Experts. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, 31, 320 - 342.
- Paraskeva, S., & Tsoufas, G. (2025). Mitigating risks in public procurement. *Journal of Public Procurement*.
- Putrianti, S., & Amrullah, I. (2021). Risk Mitigation Strategies in Public Procurement Process. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*.
- Ramachandran, G. (1980). Statistical methods in risk evaluation. *Fire Safety Journal*, 2, 125-145.
- Rana, T., Wickramasinghe, D., & Bracci, E. (2019). New development: Integrating risk management in management control systems—lessons for public sector managers. *Public Money & Management*, 39, 148 - 151.
- Reed, M., Vella, S., Challies, E., De Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., Huber, T., Neumann, R., Oughton, E., Del Ceno, J., & Van Delden, H. (2018). A theory of participation: what makes stakeholder and public engagement in environmental management work?. *Restoration Ecology*, 26.
- Rodríguez, A., Ortega, F., & Concepción, R. (2016). A method for the evaluation of risk in IT projects. *Expert Syst. Appl.*, 45, 273-285.
- Soroka-Potrzebna, H. (2020). RISK IDENTIFICATION AS A BASIC STAGE OF THE PROJECT RISK MANAGEMENT.
- Spikin, I. (2012). Decision Theory and Risk Management in Public Organizations: a Literature Review Teoría De Las Decisiones Y Gestión Del Riesgo En Organizaciones Públicas: Una Revisión De Literatura.
- Suárez, D., Díaz-Puente, J., & Bettoni, M. (2021). Risks Identification and Management Related to Rural Innovation Projects through Social Networks Analysis: A Case Study in Spain. *Land*.

- Thareq, S. (2024). Risk Mitigation from a Public Service Perspective. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*.
- Ulen, T. (1990). The Theory of Rational Choice, Its Shortcomings, and the Implications for Public Policy Decision Making. *Science Communication*, 12, 170 - 198.
- Vaughan, E. (1995). Essentials of Insurance: A Risk Management Perspective. Vaughan, E. (1995). Essentials of Insurance: A Risk Management Perspective.
- Wang, X., Huang, X., Zhang, Y., Pan, X., & Sheng, K. (2021). A Data-Driven Approach Based on Historical Hazard Records for Supporting Risk Analysis in Complex Workplaces. *Mathematical Problems in Engineering*.
- Wibisono, R., & Rohman, A. (2024). "SHAPING PUBLIC POLICY AND SOCIETY:" THE APPLICATION OF RATIONAL CHOICE THEORY IN INDONESIA AND TURKIYE. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*.
- Woods, M. (2009). A contingency theory perspective on the risk management control system within Birmingham City Council. *Management Accounting Research*, 20, 69-81.
- X., & Zhang, Y. (2021). Digital Innovation Risk Management Model of Discrete Manufacturing Enterprise Based on Big Data Analysis. *J. Glob. Inf. Manag.*, 30, 1-14.
- X., & Zhang, Y. (2021). Digital Innovation Risk Management Model of Discrete Manufacturing Enterprise Based on Big Data Analysis. *J. Glob. Inf. Manag.*, 30, 1-14.

PROFIL PENULIS

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si



Penulis menyelesaikan S1 Administrasi Negara di FISIP Universitas Jember, S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Pemerintahan Universitas Airlangga dan S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik Universitas Airlangga. Alumni Sekolah Kepribadian *John Robert Powers* Surabaya. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Administrasi Negara, FISIP Universitas Jember dan Master Trainer Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang *Soft Skill* di antaranya: *Personality Development*, Pelayanan Prima, Komunikasi Efektif, *Leadership*, *Public Relations*, *Public Speaking*. Mata Kuliah yang diampu diantaranya: MSDM Sektor Publik, Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Kepemimpinan, Etika Administrasi, Manajemen Kinerja Organisasi Publik, Manajemen Inovasi dan Model Pelayanan, Komunikasi & Advokasi Kebijakan Publik, Teori Governansi, Kecakapan Komunikasi, Manajemen Perkantoran. Sertifikasi yang didapatkan penulis antara lain: Sertifikasi BNSP *Human Capital Staff*, Sertifikasi BNSP *Human Capital Manager*, Sertifikasi BNSP *Public Relations*, Sertifikasi BNSP *Master Trainer*, Sertifikasi BNSP Analisis Kebijakan Publik Level 8, Sertifikasi BNSP Asesor Kompetensi.

Ahmad Farouq Mulku Zahari, S.Sos., M.A.P



Penulis lahir di Baadia, Kota Baubau pada tanggal 28 Oktober 1993. Penulis menempuh pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Hulu Olo pada tahun 2011-2015 dan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 dengan mengambil Jurusan Administrasi Pembangunan pada Program Pascasarjana Universitas Hulu Olo pada tahun 2015-2017 dan mendapatkan gelar Magister Administrasi Pembangunan (M.A.P.). Jika

Menulis adalah upaya untuk ‘mengabadikan’ pemikiran, sedangkan mengajar adalah upaya untuk ‘mengkristalkan’ pemikiran, maka penulis pun memilih kedua-duanya dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Penulis mengawali karier sebagai dosen pada tahun 2018 ketika penulis lolos pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan saat ini penulis Menjadi Dosen PNS pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Saat ini penulis menjabat sebagai Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, yang berada di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. **Email Penulis:** ahmadfarouqmulku@gmail.com

Putri Cinta Mei, S.Sos., M.A.P.



Penulis lahir di Blitar pada 17 Mei 1995, Pendidikan sarjananya di selesaikan di Universitas Islam Balitar pada program Ilmu Administrasi Negara tahun 2017, dan meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas WR. Supratman pada tahun 2020. Penulis memulai karier akademis menjadi Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar sejak tahun 2021. Bidang keahliannya meliputi Manajemen Publik, Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Birokrasi dan Governance. Putri aktif menghasilkan karya ilmiah berupa artikel jurnal nasional dengan fokus pada Pelayanan Publik, Good Governance, Kepemimpinan, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah serta Kebijakan Publik. Ia juga tergabung dalam berbagai organisasi profesional, seperti Asosiasi Dosen Indonesia, Asosiasi Ilmu Administrasi Negara Indonesia (IAPA), Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia (APJI), dan Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia (APPISI). Penulis berharap, buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk mendukung perkuliahan pada Program

Studi Administrasi Negara/Illmu Administrasi Publik, khususnya mata kuliah Manajemen Publik, sekaligus sebagai referensi akademik bagi mahasiswa dan praktisi yang tertarik pada bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan. Penulis berharap buku ini dapat memperkaya literatur lokal yang relevan dengan konteks administrasi publik di Indonesia.

Dr. Imanuddin Hasbi, S.T., M.M.



Penulis sebagai seorang akademisi dan penulis yang memiliki keahlian di bidang manajemen, pemasaran, dan pendidikan. Berikut adalah profil singkatnya berdasarkan informasi yang tersedia: Pendidikan yang ditempuh Sarjana Teknik dan Manajemen Industri dari Universitas Pasundan, Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung, dan Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Keahlian di bidang Manajemen Pemasaran, Kewirausahaan, Administrasi, Pendidikan, dan Manajemen Afiliasi Dosen di Program Studi S1 Administrasi Bisnis, Telkom University. Publikasi dan Kontribusi memiliki publikasi ilmiah yang terindeks di Google Scholar dan SINTA (Science and Technology Index) dan Banyak Kutipan karya ilmiah di google scholar. Minat Penelitian seperti Perilaku konsumen, Manajemen penjualan, Manajemen ritel, dan Intelijen kompetitif. Dari informasi yang tersedia, Imanuddin Hasbi aktif dalam bidang pendidikan dan penelitian, dengan fokus pada manajemen dan pemasaran.

Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP.



([dayusriwid@gmail.com/](mailto:dayusriwid@gmail.com) dayusriwid@unr.ac.id)

Penulis lahir di Badung-Bali, 29 Juni. Setelah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Administrasi Negara FISIP UNWAR tahun 1997, Pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Di Pascasarjana Universitas Ngurah Rai tahun 2011 dan Pada Tahun 2015 menyelesaikan Program Doktor Ilmu

Administrasi dengan kekhususan Administrasi Publik di FIA Universitas Brawijaya-Malang. Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sebagai Dosen dpk LLDIKTI Wilayah VIII di S1 & S2 Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai, saat ini sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Ngurah Rai-Denpasar. Pernah sebagai Komisioner KPU Kabupaten Badung, Sebagai Ketua DPD IAPA (*Indonesian Association for Public Administration*) Bali Nusra dan sebagai Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Badung sampai dengan sekarang. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan dan publikasi di beberapa jurnal ilmiah, prosiding nasional dan internasional tentang Kepemiluan, Perencanaan Pembangunan, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik. Buku yang pernah diterbitkan “Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua!”, “Perilaku dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif, termasuk menulis di book chapter termasuk sebagai editor”. Aktif sebagai narasumber dalam forum ilmiah, narasumber bimbingan teknis DPRD, Tim Juri Lomba karya Tulis, Panelis Debat Publik Pilkada, Moderator, Tim Perumus, Sebagai Tim Advokasi Pengelolaan SP4N LAPOR! Di Provinsi Bali tahun 2021 s/d 2023, Sebagai Pendamping Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Bali tahun 2021, Pandu Digital Bacth Merah, sebagai reviewer di beberapa jurnal ilmiah lokal dan nasional, Konsultan Nasional Penyusunan Evaluasi Kebijakan SP4N LAPOR! Sampai saat ini sebagai Konsultan Kebijakan Publik, sebagai Asesor Analisis Kebijakan Publik.

Abul Haris Suryo Negoro S.IP., M.Si



Penulis kelahiran Jember. Pada tahun 2006 meraih Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Pada Tahun 2009, Meraih Gelar Master Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Jember. Aktif dalam penelitian yang berbasis keilmuan ilmu politik dan ilmu administrasi dengan konsentrasi kebijakan publik dan Pemerintahan Daerah. Penulis saat ini aktif dalam Riset Group “Institute maritime for studies” Universitas Jember dan menjadi Pengurus Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur. Selain itu, menjadi pengurus Organisasi

Profesi yaitu Indonesian Association Public Administration (IAPA) Jawa Timur dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jember. Pemakalah di beberapa acara seminar baik internasional maupun nasional. Memiliki beberapa publikasi Jurnal Internasional dan nasional, menerbitkan beberapa buku referensi yang berjudul [Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia](#) (2019) dan [Kepemimpinan Kepala Daerah Pascapilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah](#) (2021). Pengalaman pekerjaan penulis selama ini beragam, mulai peneliti, konsultan dan dosen. Sejak tahun 2015, menjadi dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dr. Setyowati Karyaningtyas, S.Sos, M.Si



Penulis lahir di Lamongan pada 17 Juli 1988. Beliau adalah seorang dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Saat ini beliau menetap di Perumahan Bumi Mangli Permai Blok CCC 11, Jember. Dalam kehidupan pribadinya, beliau menikah dengan Tri Adi Puji Raharjo dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Prada Adhi Nugroho dan Praga Setyo Nugroho. Perjalanan pendidikan beliau dimulai dari SDN Lawak 1 Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan (1994–2000), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Babat, Kabupaten Lamongan (2000–2003), dan SMA Negeri 2 Lamongan (2003–2006). Setelah itu, beliau menempuh pendidikan tinggi di Universitas Jember pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 2010. Pendidikan magister ditempuh di kampus yang sama pada Program Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember dan selesai pada tahun 2014. Selanjutnya, beliau melanjutkan studi doktoral di Program Doktor Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2024.

Dr. Wydha Mustika Maharani, S.AP., M.AP.,



Penulis lahir di Blitar pada 7 November 1990. Penulis menyelesaikan Sarjana Administrasi Publik di Universitas Brawijaya pada 2013, diikuti dengan Magister Administrasi Publik dari Universitas Merdeka Malang pada 2016, dan meraih Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya pada 2023. Penulis memulai karier akademiknya sebagai dosen di Universitas Islam Balitar pada 2017, dan sejak 2025 mengajar di Universitas Jember. Fokus penulis adalah di bidang administrasi publik, baik dalam pengajaran maupun penelitian. Penelitian penulis banyak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dengan topik kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui buku ini, penulis berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam administrasi publik dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan administrasi publik di Indonesia.

Muhamad Nanda Al Hakim Akbar, S.AP., M.AP.



Penulis lahir di Banyuwangi, 09 September 1998, adalah akademisi di bidang administrasi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Ia menyelesaikan pendidikan Magister Administrasi Publik di Universitas Brawijaya dengan bidang minat Kebijakan Publik. Kemudian juga memiliki ketertarikan khusus pada tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Selain mengajar, menulis, dan melakukan riset, penulis juga sering terlibat dalam pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Ia percaya bahwa pembangunan desa wisata berkelanjutan bukan hanya tentang menarik wisatawan, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menjaga kearifan lokal, dan merawat keberlanjutan lingkungan secara nyata.

Yaen Miftakhul Laily, M.AP.,



Penulis lahir di Ponorogo, Jawa Timur. Saat ini, beliau berprofesi sebagai dosen di Universitas Jember, dengan minat keilmuan yang berfokus pada administrasi publik dan kebijakan publik. Semasa menempuh pendidikan magister, Yaen aktif mengikuti berbagai program hibah penelitian, yang memperkuat komitmennya dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset. Sebelum mengabdikan diri di Universitas Jember, beliau pernah menjalani pengalaman sebagai dosen kontrak di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), yang memperkaya wawasannya dalam dunia pendidikan tinggi serta membentuk karakter pengajar yang adaptif dan inovatif. Selain mengajar dan meneliti, Yaen juga aktif menulis karya ilmiah dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan penguatan tata kelola publik di Indonesia.

Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.



Penulis lahir di Yogyakarta 9 Juni 1966. Pendidikan Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Airlangga, Pendidikan Master of Human Resource Management dari Wollongong University Australia, Pendidikan Doktorat Administrasi Negara dari Fisipol UGM. Pekerjaan sekarang sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama UWP sekaligus sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Inklusi Sosial UWP. Penulis juga menjadi pengurus Pusat Indonesian Association for Public Administration sejak tahun 2011, sekarang sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Profesi dan dipercaya menjadi Direktur LSP Administrasi Publik Indonesia (LSP API). Interest penelitian di bidang organisasi dan manajemen publik, dan inovasi sektor publik. Beberapa buku yang dihasilkan antara lain Manajemen Sektor Publik: Efektivitas, Produktivitas, dan Kualitas (2010); Dilema Diskresi Birokrasi dalam Konteks Sistem Akuntabilitas Publik (2011); Capacity Building Model: Penguatan kapasitas desa berbasis nilai kearifan lokal (2023), Kontributor beberapa buku antara lain: Administrasi Negara: Isu-Isu Kontemporer (2009),

Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (2009), dan menyusun Modul Bahan Ajar Interaktif Universitas Terbuka mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik.

Dr. Masadib Akmal Vyandri, S.AP., M.A.P



Penulis adalah dosen di Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Administrasi Negara. Penulis lahir di Surabaya 27 Juli 1991. Penulis menempuh pendidikan S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya, S2 Ilmu Administrasi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan S3 Ilmu Sosial di Universitas Airlangga. Penulis memiliki minat di bidang administrasi publik dan digital governance.

Dr. R. Sally Marisa Sihombing, S.I.P., M.Si



Penulis adalah Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU SUMATERA UTARA. Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut: Pendidikan S1 tahun 1995 kuliah dan lulus di UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta dengan keilmuan Administrasi Negara. Aktif di BEM UGM dan aktif di kegiatan PMK (persekutuan mahasiswa kristen) FISIP UGM sambil mengikuti Magang di Sekretariat Negara Jakarta tahun 1998 - 1999 dengan bidang kerja pengelolaan arsip. Tahun 2001 mendapatkan beasiswa S2 di Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta. Bekerja sebagai konsultan lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah di BAPPEDA PROVINSI KALTENG kerjasama dengan EUROCONSULT MASTER PLAN BELANDA selama 3.5 tahun sebagai *Communicator* yang bertugas menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pihak Belanda dan Inggris (Eropa) yang memiliki kerjasama dengan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. Dilanjutkan *communicator* di Konsultan CARE INTERNASIONAL (Australia) Palangkaraya. Tahun 2010 diterima menjadi Dosen PNS di Universitas Palangkaraya (UPR) Kalimantan Tengah di Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Selang beberapa bulan melanjutkan studi di Program Doktor

Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tahun 2011 - 2017 di Program studi Ilmu Administrasi Publik. Memiliki kepakaran dari kegiatan riset di S1 sampai S3 yaitu Manajemen Kebijakan Publik dengan kajian *local wisdom* dibidang budaya birokrasi keterkaitan dengan budaya masyarakat, budaya manajemen kebijakan dari tata kelola lingkungan wilayah air serta budaya kelembagaan sektor publik. Mata kuliah yang diberikan dalam kompetensi dosen yang bersangkutan adalah Analisis Kebijakan Publik, Evaluasi Program, Filsafat Ilmu, Formulasi Kebijakan, Pembangunan Kelembagaan, Tata Kelola Sektor publik dan Inovasi Sektor Publik. Dosen yang bersangkutan sekarang juga dipercaya dan mendapatkan mandat sebagai KEPALA LABORATORIUM PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FISIP USU SUMUT ta 2021 - 2026. Sertifikat yang diperoleh adalah Sertifikat Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai Asesor Kepegawaian tingkat Universitas, Asesor Penjaminan Mutu Universitas Palangkaraya, Asesor penjaminan mutu Universitas Sumatera Utara dan sertifikat BNSP sebagai instruktur.

Fajri Maulana



Penulis lahir di Jember pada 20 September 1990, adalah seorang Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Ia menyelesaikan studi sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara di kampus yang sama (2009-2016), kemudian melanjutkan pendidikan magister di Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta (2021-2023). Pengalaman birokratis sebelumnya, khususnya dalam tata kelola pembangunan desa dan daerah tertinggal, membentuk perspektif empirik yang mewarnai aktivitas akademiknya. Minat kajiannya mencakup administrasi publik, pembangunan perdesaan, governansi, dan transformasi digital dalam pelayanan publik. Sebagai akademisi, ia berupaya menjembatani teori dan praktik guna memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan pembangunan yang berkelanjutan. Baginya, menulis merupakan bagian dari pengabdian akademik yang tidak berhenti pada ruang kelas, melainkan turut hadir dalam ruang-ruang publik sebagai kontribusi

intelektual yang membumi. Ia dapat dihubungi melalui e-mail:
fajrimaulana@unej.ac.id

MANAJEMEN PUBLIK

Manajemen publik adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi sektor publik—seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga negara—mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berbeda dengan manajemen bisnis yang berorientasi pada profit, manajemen publik berfokus pada kepentingan masyarakat luas serta pelayanan yang adil dan transparan. Dalam manajemen publik, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik menjadi inti dari aktivitasnya. Hal ini mencakup manajemen sumber daya manusia aparatur negara, pengelolaan anggaran publik, serta pengendalian kinerja instansi pemerintah. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi menjadi landasan penting dalam pelaksanaan manajemen publik modern. Manajemen publik juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan hukum yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner digunakan, menggabungkan teori-teori dari ilmu politik, administrasi, ekonomi, hingga sosiologi. Dalam praktiknya, manajemen publik terus berkembang dengan adopsi teknologi digital, reformasi birokrasi, serta dorongan untuk meningkatkan pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penjualan Buku
0815-7000-699

Manajemen & Marketing

ISBN 978-634-246-262-1



9 786342 462621